

## BAB II

### DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Pada bab ini penulis akan membahas tentang dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada saat Perang Dingin, pasca Perang Dingin dan dibandingkan dengan era presiden Barack Obama yang dimana Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi bersama Arab Saudi, hal ini dibuktikan dengan pengumuman bahwa Amerika mengirimkan bantuan berupa *non-lethal aid* kepada pihak oposisi bersama Arab Saudi, hal ini sejalan dengan tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu untuk menjamin keamanan Amerika yang demokratis, *balance of power* yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keselamatan masyarakat demokratis dan ekspansi kekuatan dan pengaruh Amerika di dunia yang berkaitan dengan promosi sistem demokrasi.<sup>1</sup>

#### A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada Era Perang Dingin (1945-1990)

Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan Liberal-kapitalis mempunyai pengaruh yang luas, begitu pula pada saat era Perang Dingin yang terjadipasca berakhirnya Perang Dunia II, Dalam perjalananya Pada era Perang Dingin Amerika Serikat memfokuskan kebijakannya dalam rangka memenangkan Perang Dingin melalui cara pemberian pinjaman-pinjaman lunak terhadap negara-negara

---

<sup>1</sup>John Spanier, *American Foreign Policy Since World War II*. Washington D.C: CQ Press, 1988. (hlm. 100-101)

di benua Eropa (barat) dan Asia, tetapi tidak dengan TimurTengah.

### Gambar 2.1. Peta Kawasan Timur Tengah



Sumber: <https://www.erasuslim.com/berita/analisa/kudeta-militer-atas-mursi-ubah-peta-politik-di-timur-tengah.htm>

Perang Dunia ke dua baru saja selesai dan dimulainya era Perang Dingin antara dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Presiden Truman dengan Doktrin nya yaitu Doktrin Truman yang di deklarasikan pada tahun 1947 menyatakan bahwa Amerika akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran pengaruh Komunisme di seluruh penjuru dunia termasuk di kawasan Timur Tengah.

Truman pada 12 Maret 1947 kepada Kongres meminta bantuan dana untuk membantu Yunani dan Turki dengan pinjaman sebesar 400 juta dollar untuk mencegah pengaruh Komunisme Soviet di kedua negara tersebut, di Timur Tengah sendiri Amerika dibawah pemerintahan Truman menjadi negara pertama yang mengakui berdiri nya negara Yahudi yaitu Israel secara *de facto*, bagi Truman ini merupakan kepentingan Amerika yang tidak hanya

mengutamakan keselamatan Israel tetapi juga kepentingan akan minyak dan keunggula Amerika.<sup>2</sup> Hal ini berimbas kepada timbulnya sentimen anti-Amerika di antara negara-negara Arab karena pendudukan wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika, Truman juga mendukung adanya penempatan 100.000 orang yahudi di Palestina.<sup>3</sup>

Alasan dibelakang sikap Amerika yang mendukung Israel bukan tanpa tujuan tetapi dikarenakan adanya kepentingan Amerika yang pada saat itu dibawah pemerintaha Truman sedang menghambat penyebaran ideologi Komunisme yang di sebarakan oleh mantan sekutunya dalam Perang Dunia ke dua, dan juga Amerika membutuhkan sekutu yang dapat dijadikan akses menuju wilayah Timur Tengah yang memiliki sumber daya alam berupa cadangan minyak yang dibutuhkan Amerika untuk menjalankan ekonomi negaranya.

Pada 5 Januari 1957, Presiden A.S Dwight Eisenhower dengan diawali pidatonya mengadakan pertemuan dengan kongres untuk merubah haluan yang dimana ia menganggap Timur Tengah sebagai wilayah yang seharusnya diperhatikan karena letaknya yang strategis dan akibat adanya nasionalisasi terusan Suez oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang diikuti oleh Suriah dengan memotong jalur pipanya sehingga membuat Inggris bergantung kepada Amerika untuk menggantikan kerugiannya di TimurTengah. Dalam hal ini Mesir yang mana tidak hanya mendapat dukungan dari negara-negara Arab lainnya tetapi juga oleh Uni Soviet sehingga Eisenhower membujuk kongres untuk memusatkan

---

<sup>2</sup>G. Lenczowski, *American Presidents and the Middle East*, Duke University Press, Durham, 1990. (Hlm. 9)

<sup>3</sup>Julius W. Pratt, *A History of United States Foreign Policy*, 2nd Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1965.(hlm. 514).

perhatiannya ke wilayah ini dengan alasan untuk menghentikan komunisme internasional dengan hadirnya dukungan dari Uni Soviet terhadap tindakan berani yang dilakukan oleh presiden Mesir.

Eisenhower juga meminta otorisasi untuk menggunakan pasukan AS guna menghadapi ancaman Soviet dan Komunis Internasional dengan mengamankan dan melindungi integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara Timur Tengah yang meminta bantuan untuk melawan agresi bersenjata dari negara manapun yang dikendalikan "Komunisme Internasional".

Doktrin D. Eisen Hower menyerukan seruan pertamanya untuk bertindak pada musim panas 1958, ketika perselisihan sipil di Lebanon terjadi dan menyebabkan Presiden Lebanon, Camille Chamoun meminta bantuan kepada Amerika. Kurang lebih sebanyak 15.000 pasukan A.S dikirim untuk membantu mengatasi perselisihan tersebut.

Presiden Johnson dikenal dekat dengan Kelompok lobi Yahudi di Amerika sejak masih menjadi anggota Kongres pada tahun 1950an, dengan kedekatannya tersebut ia menginstruksikan pengiriman pesawat skyhawk sebanyak 50 unit, 250 unit tank dan peralatan miiter canggih lainnya hal ini menjadi penyebab kuat atas kemenangan Israel di dalam peperangan melawan Arab pada tahun 1967.

Presiden Nixon melakukan strategi *retrenchment*, yaitu suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi skala keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah luar negeri. Meski demikian Nixon tetap memiliki strategi yang jangkauannya lebih luas dan efektif atau yang biasa disebut *grand strategy* berupa "strategi pilar ganda", secara implisit strategi ini menunjukkan indikasi strategi *offshore balancing* yang

kemudian dalam perjalanannya Iran dan Arab Saudi berperan sebagai penyeimbang dikawasan Timur Tengah.<sup>4</sup>

Presiden Ford mendukung dan meneruskan kebijakan *Detente* yang diambil oleh Presiden Nixon hal ini dapat dilihat dari langkah Presiden Ford yang mempertahankan Henry Kissinger yang dulu bekerja untuk Nixon.<sup>5</sup> Pada musim semi tahun 1975, Presiden Ford melakukan rangkaian kunjungan di Timur Tengah termasuk Presiden Mesir Anwar Sadat, Perdana Menteri Israel Rabin, Raja Hussein dari Yordania, Deputi Perdana Menteri Suriah Khaddam dan yang lainnya untuk membahas prospek perdamaian yang adil dan komprehensif di wilayah Timur Tengah, tidak lama kemudian pada awal bulan September sebuah kesepakatan yang berpotensi memiliki peran penting di wilayah Timur Tengah terwujud antara Mesir dan Israel, kesepakatan ini memperkuat gencatan senjata tahun 1973, akibat dari kesepakatan tersebut Kanal Suez terbuka bagi kapal barang Israel untuk pengiriman non-militer yang merupakan peristiwa pertama kali nya dalam bertahun-tahun.<sup>6</sup>

Presiden Jimmy Carter, memiliki pendekatan berbeda yang digunakan terhadap wilayah Timur Tengah, yaitu dengan lebih menekankan permasalahan lokal di wilayah tersebut dibandingkan dengan permasalahan konflik Timur & Barat, dan lebih menekankan hubungan politis daripada masalah militer maupun keamanan.

---

<sup>4</sup>J.P Miglietta, *American Alliance Policy in the 1945-1992: Iran, Israel, and Saudi Arabia*, Lexington Books, Lanham, and Oxford, 2002. (Hlm. 229)

<sup>5</sup>John Robert Greene, *Gerald Ford: Foreign Affairs*, Miller Center, <https://millercenter.org/president/ford/foreign-affairs>, diakses pada 13 Februari 2018.

<sup>6</sup><https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/factbook/foreign.htm>, diakses pada 13 februari 2018.

Pada babak kedua di era Carter posisi Amerika di wilayah tersebut terpengaruhi terutama oleh trauma yang diakibatkan oleh peristiwa pada tahun 1979 yang dimana terjadinya Revolusi Iran dan pengekangan terhadap warga Amerika yang berada di Teheran dan Soviet yang melakukan invasi ke Afghanistan. Banyak warga Amerika berfikir bahwa revolusi tersebut yang berkontribusi terhadap perkiraan berlebihan Amerika terhadap kediktatoran yang represif

Pada Tahun 1980 munculah Doktrin Carter yang dimana Presiden Carter membuat pernyataan persatuan yang menggaris bawahi pendekatan yang digunakan dalam kerangka kerjasama keamanan negara-negara Timur Tengah melawan Uni Soviet, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Amerika di wilayah tersebut terutama dikarenakan Amerika sangat bergantung pada suplai minyak dari TimurTengah.<sup>7</sup>

Pada tahun 1981, saat Amerika Serikat dipimpin oleh Ronald Reagan Amerika memiliki kepentingan yang konsisten di Timur Tengah bahkan Timur Tengah dijadikan fokus utama dan mungkin satu-satunya fokus dari kebijakan luar negeri Amerika dalam beberapa tahun belakangan, tidak hanya karena wilayah tersebut secara meningkat menjadi tempat terjadinya krisis internasional tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur secara keseluruhan dinamika politik luar negeri Amerika.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Kenneth A. Oye, Robert J. Lieber dan Donald Rothchild. Op. Cit., 1983. hlm. 370-372

<sup>8</sup>Kenneth A. Oye, Robert J. Lieber dan Donald Rothchild. Op. Cit., 1983, hlm 368.

## **B. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Pasca Perang Dingin (1990-2006)**

Dengan hilangnya pengaruh Ideologi Komunisme, yang mana pada saat bersamaan Uni Soviet pun runtuh Amerika menggunakan kesempatan ini untuk mencegah jika saja muncul kembali kekuatan baru yang dapat membahayakan posisi Amerika di Timur Tengah dan bahkan di seluruh penjuru dunia dengan sebuah rancangan tatanan dunia yang baru atau yang biasa disebut New World Order.

Hal tersebut bertujuan untuk mengukuhkan bahwasannya Amerika adalah negara yang menguasai dunia, dalam upaya tersebut Amerika meninjau ulang strategi-strateginya dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya dan sebagai negara paling berpengaruh di muka bumi, strategi tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang bernama National Security Strategy atau yang disingkat NSS.

Dokumen tersebut diterbitkan pada September 2002 yang didalamnya berisikan tiga prinsip dasar Doktrin Bush: pertama, mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat di Dunia. Kedua, menerapkan strategi pre-emptive attack terhadap ancaman potensial bagi keamanan Amerika Serikat dan yang Ketiga Mempromosikan prinsip Demokrasi Liberal yang merupakan sistem pemerintahan yang digunakan di Amerika.

Pada 1990 sebuah kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menunjukkan pada dunia bahwasannya Amerika merupakan pelindung dan pemimpin dunia ikut mengintervensi serangan Irak ke Kuwait atau yang disebut Perang Teluk I dimana Amerika mengirimkan pasukannya dalam operasi militer yang dinamai *Operation Dessert Storm*, dengan Irak menempatkan 300.000 pasukannya di Kuwait berhasil menguasai wilayah Kuwait dengan mudah dan menguasai suplai Minyak dunia sebesar 20% pada saat itu.

Pada akhir nya Irak mengalami kekalahan dan dipukul mundur oleh pasukan Amerika dan Koalisi, hal tersebut menjadi titik balik kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk memantapkan keinginan nya dalam mewujudkan tatanan dunia yang baru dengan Amerika sebagai pemimpin tunggal, hal tersebut di usulkan oleh Presiden Bush Senior, dimana bertujuan untuk menghalangi timbul nya kekuatan baru seperti yang tertuang dalam pedoman bagi perencanaan pertahanan Amerika Serikat.

Ketika Irak menarik mundur pasukan nya dari Kuwait, Amerika Serikat bersama sekutu nya Inggris meminta kepada PBB agar menjatuhkan sanksi terhadap Irak dengan ada nya sanksi seperti larangan bagi Irak untuk menjual Minyak nya yang tentu berdampak besar bagi per ekonomian Irak, walaupun gencatan senjata telah dilakukan sanksi tersebut tidak lah dicabut. Amerika Serikat hingga awal abad ke-21 menempatkan pasukan nya di Teluk Persia sebanyak 17.000-24.000 pasukan.<sup>9</sup>

Melalui invasi ke Irak ini lah Amerika berhasil memasuki wilayah Timur Tengah dengan mudah, Amerika berhasil mendirikan Pangkalan Miiter nya di wilayah Timur Tengah dan memperluas pengaruh nya di wilayah tersebut, melalui basis militer inilah Amerika Serikat berhasil menaklukan Irak yang dianggap sebagai ancaman bagi Amerika, kepentingan nya dan sekutu-sekutu nya di Timur Tengah.

Amerika juga menggunakan Poitik Luar Negeri Standar Ganda, hal ini bertujuan untuk melancarkan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah yang mana untuk mencapai tujuan nya Amerika tidak memaksakan sistem Demokrasi terhadap Saudi dikarenakan pengaruh Saudi ysg besar di kawasan Timur Tengah sehingga dapat dijadikan sekutu yang

---

<sup>9</sup>Sidik Jatmika. Op. Cit., 2014. Hlm. 141-143



berguna bagi Amerika agar kepentingannya berjalan lancar di wilayah tersebut.

### **C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Era Presiden Barack Obama(2009-2016)**

Pada tahun 2008 Obama melakukan Kampanye nya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, kampanye yang dilakukan Obama berisikan program kerja dan kebijakan yang akan di terapkan jika ia terpilih menjadi presiden, salah satunya yaitu menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, mengajak rakyat Amerika untuk tidak bergantung kepada energi minyak dan mencoba untuk menggunakan energi alternatif agar tidak bergantung terhadap minyak.

Sedangkan dalam kebijakan luar negeri nya Presiden Obama memiliki pendekatan yang sama dengan Era Presiden Nixon hal ini menjadi menarik dikarenakan dengan perbedaan jarak waktu selama empat puluh tahun ternyata terdapat kesamaan diantara keduanya dalam mengambil kebijakan luar negeri terutama dikawasan Timur Tengah yang dimana kedua Presiden menggunakan kebijakan *Detente*, pada era Presiden Nixon kebijakan ini digunakan untuk mengurangi eskalasi adventurisme pasukan Amerika di Timur Tengah terutama pasca era kepemimpinan Presiden Lyndon tahun 1964-1969.<sup>10</sup>

Obama dalam menjalankan kebijakan luar negeri nya cenderung lebih lunak, Presiden Obama lebih menekankan konsep *Smart Power* ketimbang *Hard Power* yang digunakan Bush. Konsep *Smart Power* ini merupakan perpaduan antara *Hard Power* dan *Soft Power*, istilah *Smart Power* ini merujuk dari "*Foreign Affairs*" pada tahun 2004.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>H. Jones, *Crucible of Power: A History of U.S. Foreign Relations Since 1897*, 2nd edition, Scholarly Resources, Oxford, 2008. (Hlm. 354-380)

<sup>11</sup>Suzanne Nossel, *Smart Power: Reclaiming Liberal Internasionalism*, Foreign Affairs, Maret

Konsep Smart Power padasaat ini di populerkan oleh Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton dan Presiden Obama yang berusaha merubah citra Amerika yang agresif di wilayah Timur Tengah saat di pimpin Presiden Bush dalam kebijakan *War On Terror* nya menjadi lebih efektif. Seperti yang dikatakan Menlu Hillary Clinton "*With Smart Power, diplomacy will be the vanguard of foregin policy*" yang dimaksud adalah dengan Smart Power maka diplomasi akan menjadi barisan terdepan dalam menjalankan kebijakan luar negeri hal ini dilakukan untuk menghindari ada nya penggunaan kekuatan secara berlebihan yang bersifat represif seperti pada era Bush dan mengurangi korban jiwa terutama dari tentara Amerika.

Obama juga melakukan langkah lain dengan mengurangi jumlah pasukan di Afghanistan yang sebelumnya di terjunkan oleh Presiden Bush dengan kebijakan *War On Terror* nya pasca pengeboman 11 September 2001 di gedung World Trade Center yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan.

Meskipun dengan kebijakan *Detente* tersebut Presiden Obama dalam Krisis Suriah mempunyai strategi yang lain karena dalam Krisis Suriah diawali dengan peristiwa Arab Spring yang mengejutkan tidak hanya Amerika tetapi seluruh Dunia yang dimana negara-negara Arab dengan sistem Monarki Absolute di jatuhkan oleh rakyatnya yang mendukung pemerintahan yang lebih demokratis, tentu kejadian ini tidak disia-siakan oleh Amerika dengan mengirim pasukan nya ke negara-negara Arab yang berkecamuk salah satunya Suriah.

Dengan jelas Amerika Serikat menyikapi dengan serius Krisis yang terjadi di Suriah, hal ini ditunjukan dengan pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Amerika seperti hal nya bantuan senjata dan bantuan lain nya berupa *Non-*

*Lethal Aid* kepada pihak oposisi agar dapat terus melakukan perlawanan terhadap Rezim Assad, pengiriman bantuan tersebut diberikan setelah terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh rezim Assad terhadap rakyatnya sendiri dengan menggunakan senjata kimia yang menewaskan 100-150 orang.

Senjata yang digunakan oleh militer Suriah yaitu Gas Syaraf Sarin, gas ini sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat dan menyerang sistem syaraf manusia dan pada akhirnya dapat melumpuhkan target dengan cepat sehingga pihak Assad menggunakan senjata ini untuk menghadapi pihak oposisi secara efektif, jika pemerintah Assad terbukti menggunakan senjata kimia Amerika akan mengirimkan bantuan senjata kepada pihak oposisi.

Lalu sikap Amerika terhadap Suriah tidak terlepas dari hubungan antara Amerika dengan Suriah itu sendiri, dimana dibawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad yang pada saat itu memburuk dikarenakan invasi yang dilakukan oleh Amerika terhadap Afghanistan dan Iraq dalam kebijakan *War on Terror* Era Presiden Bush, Suriah ikut membantu Iraq dalam melawan Amerika. Selain itu Suriah juga masuk kedalam daftar *Axis of Evil* yang mana dipercayai telah mendukung terorisme di Amerika sejak 1979 yang diterbitkan oleh NSC (National Security Council) directive-17 pada Desember 2002.<sup>12</sup>

. Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi bersama Arab Saudi, hal ini dibuktikan dengan pengumuman bahwa Amerika akan mengirimkan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak/oposisi setelah Amerika Serikat meyakini dan memiliki bukti bahwa Presiden

---

<sup>12</sup>U.S Department of State, *U.S Relations With Syria*, 20 Maret, 2014, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm>, diakses pada 12 Februari 2018.

Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi<sup>13</sup>. Selain mempersenjatai kelompok oposisi, Presiden Obama juga merencanakan *limited military strike* terhadap Suriah sebagai bentuk hukuman atas penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rakyat Suriah itu sendiri yang menjadi korban.

Amerika dengan alasan kemanusiaan menyatakan akan berusaha membantu untuk mengakhiri konflik Suriah dengan melalui jalur militer namun hal tersebut masih merupakan sebuah isu yang dimana Presiden Barack Obama mendapatkan desakan dari Kongres untuk mengerahkan kekuatannya untuk membantu pihak oposisi pemerintah Suriah yang sedang berusaha untuk menjatuhkan Bashar al-Assad sehingga banyak korban berjatuhan dikarenakan pemerintah Assad menggunakan senjata-senjata yang berbahaya terhadap rakyatnya sendiri.

---

<sup>13</sup>Associated Press, 'UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe must confirm chemical weapon use'<http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/un-chief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm/>, diakses pada 6 Desember 2017

**Gambar 2.2. Asap melambung tinggi setelah terjadi serangan udara oleh pasukan Assad di wilayah Ghouta Timur, Suriah.**



Sumber: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140604\\_assad\\_suriah](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140604_assad_suriah)

Banyak upaya yang dilakukan Amerika untuk meredakan Krisis di Suriah adapun salah satunya dengan mengirimkan bantaun *Non Lethal Aid* kepada pihak oposisi yaitu FSA (Free Syrian Army) agar tetap dapat terus melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Assad dan bantuan lainnya melalui organisasi internasional, karena pengaruh Amerika yang kuat hal ini dapat diwujudkan dengan koalisi dengan negara-negara lain yang ingin ikut membantu melalui upaya Amerika dalam melobi negara-negara itu, dengan cara ini Amerika mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sepaham dan sependapat tetapi usaha ini gagal dikarenakan pada Oktober 2011 dan Juli 2012 Amerika yang mendukung draf resolusi yang berisi kecaman terhadap pemerintahan tetapi gagal karena Russia dan China mem-veto resolusi tersebut, hal ini tentu menghancurkan harapan akanmereda nya konflik di Suriah itu sendiri.

Usaha Amerika tidak mudah dikarenakan absennya dukungan oleh sekutu-sekutu yang tidak seperti dulu dimana mereka mendukung agresi militer Amerika

Serikat diAfghanistan dan Iraq, serta adanya kehadiran Russia dan Iran yang kuat berada dibalik rezim Bashar al-Assad sehingga konflik Suriah menjadi konflik yang berkepanjangan tanpa adanya titik terang resolusi damai.

Amerika walaupun tidak didukung oleh sekutu lama nya tetapa mendapat dukungan dari negara-negara seperti Saudi, Qatar dan Turki hal ini terbukti dengan adanya serangan militer melalui udara dan darat oleh turki di wilayah Kurdi, Banyaknya korban jiwa dalam krisis ini membuat Amerika berusaha untuk menyelesaikannya dengan bantuan PBB, ini dikarenakan peristiwa ini sudah memasuki ranah Krisis Kemanusiaan yang dimana rezim Bashar al-Assad menyerang rakyatnya sendirimenggunakan senjata kimia sehingga korban jiwa berjatuhan dari kalangan sipil, ratusan ribu warga Suriah mengungsi untuk bertahan hidup dari serangan pemimpinnya sendiri.

Sejak meletusnya konflik di Suriah pada bulan Maret 2011 sampai dengan Agustus 2016 jumlah korban meninggal sebanyak 301.781 jiwa, korban dari warga sipil terdiri dari 15.099 anak-anak dan 10.018 wanita<sup>14</sup>, sementara yang mengungsi sebanyak 2,4 juta jiwa dan 1\4 diantara pengungsi tersebut adalah anak-anak dan perempuan, sekitar 4 juta warga Suriah kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah.

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan terkait masalah yang menjadi sumber konflik di Suriah. *Pertama*, masalah sosial, ekonomi dan politik dalam negeri yang dialami oleh Suriah seperti tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan mobilitas sosial, pembatasan hak politik serta aparat keamanan yang represif. *Kedua* yaitutuntutan dari penduduk Suriah agar dilakukanya reformasi dan penggantian rezim keluarga Assad yang telah lamaberkuasa sejak tahun 1970 oleh Hafiz al-Assad sampai

---

<sup>14</sup>Syrian Observatory for Human Rights

tahun 2000 dan digantikan oleh anak nya Bashar al-Assad hingga saat ini.

Merupakan hal yang wajar jika terjadi demo yang menuntut pergantian rezim yang telah berkuasa selama 40 tahun lebih di Suriah, terutama jika ditinjau dari segi kinerja yang tidak memuaskan bagi rakyat yang seharusnya pemerintah bekerja untuk memajukan kehidupan masyarakat, jika saja kinerja pemerintahan tersebut sesuai dengan harapan rakyat maka tidak akan ada protes yang berujung kepada munculnya perang sipil antara pemerintah dan oposisinya yang kemudian disusupi oleh jihadis seperti Al-Qaida sehingga eskalasi peperangan pun semakin besar dan berkepanjangan